



# Paradoks Perlindungan Sosial: Analisis Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Merauke

Yunus Yod<sup>1</sup>, Yohanies E. Teturan<sup>2</sup>, Ransta L Lekatompessy<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Musamus, Jl Kamizaun Mopah Lama, Merauke, Indonesia

## Abstract

*Social protection is a crucial policy instrument in efforts to reduce poverty and social inequality; however, in practice, it is often confronted with gaps between policy design and implementation at the local level. This study aims to analyze the paradox of social protection by examining the discrepancies between policy frameworks and the actual practices of social assistance distribution in Merauke Regency, a peripheral region characterized by complex social and geographical conditions. This research adopts a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, and subsequently analyzed using an interactive data analysis model with a thematic approach. The findings reveal several forms of implementation gaps, including targeting inaccuracies, unequal access to social assistance across regions, and issues related to data accuracy and synchronization. These findings indicate that limited institutional capacity, weak coordination among stakeholders, and insufficient adaptation of policies to local contexts are key factors affecting the effectiveness of social assistance distribution. The study concludes that although social protection policies in Indonesia are normatively designed to ensure equity and inclusiveness, their implementation in peripheral regions continues to face structural and contextual challenges. Therefore, more adaptive, context-sensitive, and participatory policy approaches are required to mitigate the social protection paradox and enhance the effectiveness of social assistance delivery at the local level.*

**Keywords:** *Social protection; social assistance; policy implementation; implementation gap; peripheral regions; Merauke Regency.*

## Abstrak

Perlindungan sosial merupakan instrumen penting dalam upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial, namun dalam praktiknya sering kali dihadapkan pada kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradoks perlindungan sosial melalui pengkajian kesenjangan antara kebijakan dan praktik penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Merauke, sebagai wilayah perifer dengan karakteristik sosial dan geografis yang kompleks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif dengan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai bentuk kesenjangan implementasi, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, ketimpangan akses bantuan sosial antarwilayah, serta permasalahan akurasi dan sinkronisasi data. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya koordinasi antaraktor, serta kurangnya adaptasi kebijakan terhadap konteks lokal menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan perlindungan sosial di Indonesia telah dirancang secara normatif untuk menjamin keadilan dan inklusivitas, praktik implementasinya di wilayah perifer masih menghadapi tantangan struktural dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif, kontekstual, dan partisipatif untuk mengurangi paradoks perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** Perlindungan sosial; bantuan sosial; implementasi kebijakan; kesenjangan kebijakan; wilayah perifer; Kabupaten Merauke.

<sup>1</sup> **CONTACT:** [yunusyod@gmail.com](mailto:yunusyod@gmail.com)

**DOI:** <https://10.35724/mjpa.v8i1.7325>

## 1. Pendahuluan

Perlindungan sosial telah menjadi instrumen kebijakan yang semakin penting dalam agenda pembangunan global, khususnya sebagai respons terhadap meningkatnya ketimpangan sosial, kerentanan ekonomi, dan risiko sosial yang dihadapi kelompok masyarakat rentan di berbagai negara[1]. Secara konseptual, perlindungan sosial mencakup seperangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk melindungi individu dan rumah tangga dari guncangan sosial-ekonomi, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, serta meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat dalam jangka panjang. Bantuan sosial sebagai salah satu pilar utama perlindungan sosial diposisikan tidak hanya sebagai mekanisme redistribusi kesejahteraan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat keadilan sosial dan inklusi. Namun, dalam praktiknya, berbagai studi menunjukkan munculnya paradoks perlindungan sosial, yakni kondisi ketika kebijakan yang secara normatif dirancang untuk menjangkau kelompok paling membutuhkan justru menghasilkan eksklusivitas, ketidaktepatan sasaran, dan ketimpangan akses akibat keterbatasan institusional, masalah data, serta kompleksitas konteks sosial lokal. Paradoks ini menegaskan pentingnya analisis kritis terhadap hubungan antara desain kebijakan dan praktik implementasi perlindungan sosial, terutama di negara berkembang dan wilayah perifer, guna memastikan bahwa tujuan keadilan sosial yang diusung kebijakan dapat terwujud secara substantif[2].

Kerangka kebijakan perlindungan sosial di Indonesia dibangun dalam upaya mewujudkan pengurangan kemiskinan, penurunan ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui berbagai program bantuan sosial yang bersifat nasional dan terintegrasi[3]. Secara normatif, kebijakan perlindungan sosial di Indonesia menekankan prinsip inklusivitas, keadilan sosial, dan akuntabilitas, dengan menjadikan kelompok miskin dan rentan sebagai sasaran utama intervensi negara. Implementasi kebijakan ini didukung oleh pendekatan berbasis data terpadu serta mekanisme desentralisasi yang memberikan peran signifikan kepada pemerintah daerah dalam proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan sosial. Namun demikian, kompleksitas tata kelola lintas sektor, perbedaan kapasitas institusional antar daerah, serta dinamika sosial dan geografis yang beragam sering kali memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka kebijakan perlindungan sosial di Indonesia telah dirancang secara komprehensif, terdapat tantangan struktural dan operasional yang berpotensi menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik penyaluran bantuan sosial di lapangan.

Kabupaten Merauke memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang khas sebagai wilayah perbatasan di bagian timur Indonesia, yang menjadikannya konteks strategis sekaligus menantang dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial. Secara geografis, wilayah yang luas dengan sebaran permukiman yang berjauhan, keterbatasan infrastruktur, serta aksesibilitas yang tidak merata memengaruhi efektivitas pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Dari sisi sosial-demografis, Merauke ditandai oleh keberagaman etnis dan budaya, termasuk keberadaan masyarakat adat dengan pola hidup, struktur sosial, dan mekanisme ekonomi yang berbeda dari masyarakat perkotaan pada umumnya. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih didominasi oleh sektor informal dan subsisten meningkatkan tingkat kerentanan terhadap guncangan sosial-ekonomi, sekaligus memperkuat ketergantungan pada program bantuan sosial[4]. Dalam konteks tersebut, interaksi antara kebijakan nasional yang bersifat seragam dengan realitas lokal yang kompleks sering kali memunculkan tantangan implementasi, seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan lemahnya koordinasi antaraktor di tingkat lokal. Oleh karena itu, Kabupaten Merauke menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana dinamika lokal memengaruhi praktik penyaluran bantuan sosial dan berkontribusi pada munculnya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasinya.

Meskipun kebijakan bantuan sosial di Indonesia dirancang dengan tujuan normatif untuk menjamin perlindungan bagi kelompok miskin dan rentan, berbagai temuan empiris di tingkat lokal menunjukkan adanya permasalahan dalam praktik penyalurannya. Di Kabupaten Merauke, fenomena seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan penyaluran, serta ketimpangan akses antarwilayah masih kerap terjadi. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan persoalan teknis dalam pendataan dan distribusi, tetapi juga menunjukkan adanya masalah struktural dalam implementasi kebijakan, termasuk keterbatasan kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi, serta minimnya pemahaman konteks sosial-budaya lokal dalam proses pelaksanaan program[5]. Akibatnya, tujuan kebijakan untuk menciptakan keadilan sosial dan inklusi justru berpotensi menghasilkan eksklusivitas baru bagi kelompok yang seharusnya menjadi sasaran utama perlindungan sosial.

Di sisi lain, kajian akademik mengenai bantuan sosial di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan empiris yang signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada evaluasi kuantitatif efektivitas program atau analisis desain kebijakan di tingkat nasional, sementara dinamika implementasi kebijakan di daerah perifer, khususnya wilayah perbatasan seperti Kabupaten Merauke, relatif kurang mendapat perhatian. Selain itu, keterbatasan studi yang mengintegrasikan perspektif kebijakan dan praktik lapangan secara mendalam menyebabkan faktor-faktor kontekstual, institusional, dan sosial yang memengaruhi kesenjangan implementasi belum terungkap secara komprehensif. Kesenjangan empiris ini menegaskan perlunya penelitian yang secara kritis mengkaji paradoks antara kebijakan dan praktik penyaluran bantuan sosial dengan pendekatan kontekstual, guna memperkaya literatur perlindungan sosial dan memberikan dasar empiris bagi perbaikan kebijakan di tingkat lokal[6].

Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya mengkaji paradoks perlindungan sosial melalui analisis mendalam terhadap kesenjangan antara kebijakan dan praktik penyaluran bantuan sosial di konteks wilayah perifer, khususnya Kabupaten Merauke sebagai daerah perbatasan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan

pada evaluasi kuantitatif program atau analisis kebijakan di tingkat nasional, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik untuk mengungkap dinamika implementasi kebijakan secara kontekstual. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif kebijakan publik dengan realitas sosial, budaya, dan institusional di tingkat lokal, sehingga mampu mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan non-struktural yang berkontribusi terhadap ketidaktepatan sasaran dan ketimpangan akses bantuan sosial[7]. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah literatur perlindungan sosial di negara berkembang, tetapi juga memberikan kontribusi empiris baru terkait implementasi kebijakan di wilayah perbatasan yang masih relatif kurang terwakili dalam diskursus akademik.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dipilih untuk memungkinkan pemahaman mendalam terhadap dinamika implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial dalam konteks lokal Kabupaten Merauke[8]. Pendekatan ini relevan karena fokus penelitian tidak hanya pada hasil kebijakan, tetapi juga pada proses, aktor, serta interaksi sosial dan institusional yang membentuk praktik penyaluran bantuan sosial di tingkat lapangan. Dengan menempatkan Kabupaten Merauke sebagai satuan analisis, penelitian ini berupaya menangkap kompleksitas konteks wilayah perifer yang sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi dalam desain kebijakan nasional.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, yang dirancang untuk saling melengkapi dalam menangkap kompleksitas implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Merauke[9]. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan kunci yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap kebijakan dan praktik penyaluran bantuan sosial. Informan tersebut meliputi aparat pemerintah daerah pada level pengambil kebijakan dan pelaksana teknis, pendamping program bantuan sosial, aparat kampung/kelurahan, serta masyarakat penerima dan non-penerima bantuan. Melalui wawancara ini, peneliti menggali persepsi, pengalaman, serta penilaian informan mengenai proses pendataan, mekanisme penyaluran, kendala implementasi, dan dampak bantuan sosial terhadap kehidupan masyarakat. Observasi lapangan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik penyaluran bantuan sosial dan dinamika interaksi antaraktor di tingkat lokal[10]. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap proses administrasi, pola komunikasi antara pelaksana program dan masyarakat, serta kondisi sosial yang memengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan sosial. Teknik observasi digunakan untuk menangkap fenomena yang tidak selalu terungkap melalui wawancara, seperti praktik informal, respons masyarakat terhadap kebijakan, dan kesenjangan antara prosedur formal dan praktik aktual di lapangan.

Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi dan nonresmi yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, pedoman teknis penyaluran bantuan sosial, laporan pelaksanaan program, notulen rapat koordinasi, serta data administratif terkait penerima bantuan. Analisis dokumen ini bertujuan untuk memahami kerangka kebijakan secara normatif, mekanisme implementasi yang dirancang secara formal, serta perubahan atau penyesuaian kebijakan yang terjadi dalam praktik. Dengan menggabungkan ketiga teknik pengumpulan data tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh data yang komprehensif dan mendalam, sekaligus meningkatkan validitas temuan melalui perbandingan dan saling konfirmasi antar sumber data.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif, yang menempatkan proses analisis sebagai kegiatan yang berlangsung secara siklus, berulang, dan berkelanjutan sejak tahap awal pengumpulan data hingga penelitian berakhir[11]. Model ini memungkinkan peneliti untuk secara simultan melakukan pengumpulan data, analisis awal, serta refleksi terhadap temuan sementara, sehingga arah dan kedalaman analisis dapat terus disesuaikan dengan dinamika data di lapangan. Dengan pendekatan ini, analisis tidak dipahami sebagai tahap akhir penelitian, melainkan sebagai proses yang terintegrasi dengan seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Pada tahap reduksi data, seluruh data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi ditranskripsi, diseleksi, dan diorganisasikan secara sistematis. Reduksi data dilakukan melalui proses pengodean terbuka dan tematik untuk mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema analitis utama, seperti mekanisme implementasi kebijakan, peran dan interaksi antaraktor, bentuk-bentuk kesenjangan antara kebijakan dan praktik penyaluran bantuan sosial, serta faktor-faktor struktural, institusional, dan sosial yang memengaruhi terjadinya kesenjangan tersebut. Proses pengodean ini bersifat dinamis dan terus disempurnakan seiring dengan bertambahnya data dan pendalaman analisis.

Reduksi data tidak hanya berfungsi untuk menyederhanakan informasi, tetapi juga untuk mempertajam fokus analisis dengan menyingkirkan data yang tidak relevan dan menekankan aspek-aspek yang paling signifikan[12]. Melalui proses ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta hubungan antar kategori yang muncul dari data empiris. Dengan demikian, tahap reduksi data menjadi landasan penting bagi analisis selanjutnya, sekaligus memastikan bahwa interpretasi yang dilakukan tetap selaras dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan kategori tematik guna memudahkan identifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari temuan penelitian. Penyajian data ini berfungsi sebagai dasar bagi peneliti dalam melakukan penafsiran dan analisis lebih lanjut, sekaligus membantu mengungkap hubungan antara kerangka kebijakan formal dan realitas implementasi di lapangan. Analisis tematik

dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Merauke.

Tahap akhir analisis data dalam penelitian ini mencakup penarikan kesimpulan dan proses verifikasi yang dilakukan secara bertahap, reflektif, dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan analisis data. Penarikan kesimpulan tidak dilakukan secara linear atau final sejak awal, melainkan melalui proses penafsiran yang terus diuji dengan cara menelusuri kembali data mentah, membandingkan temuan antar sumber, serta mengevaluasi konsistensi antara data empiris dan kerangka konseptual penelitian. Proses verifikasi dilakukan melalui penerapan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari aparat pemerintah, pelaksana program, dan masyarakat, serta triangulasi teknik, dengan mengonfrontasikan hasil wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas temuan penelitian, sekaligus meminimalkan potensi bias subjektivitas peneliti dalam proses interpretasi data. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan merefleksikan realitas empiris secara lebih akurat dan kontekstual, serta mampu memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memperkaya kajian perlindungan sosial, sekaligus kontribusi praktis bagi perumusan dan perbaikan kebijakan penyaluran bantuan sosial di wilayah periferia seperti Kabupaten Merauke.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 1.1. Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Merauke secara formal telah mengacu pada kerangka kebijakan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama terkait kriteria penerima, mekanisme pendataan, serta prosedur distribusi bantuan. Pemerintah daerah dan pelaksana teknis berperan sebagai perpanjangan tangan kebijakan nasional dengan melibatkan aparat kampung dan kelurahan dalam proses verifikasi data dan penyaluran bantuan. Secara administratif, tahapan implementasi telah disusun secara sistematis dan bertingkat, mulai dari pendataan calon penerima hingga distribusi bantuan kepada masyarakat.

Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara prosedur formal dan praktik aktual di tingkat lokal. Dalam praktiknya, proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan sering kali menghadapi kendala, seperti keterbatasan pembaruan data, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta ketergantungan pada data lama yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat terkini. Selain itu, luasnya wilayah dan keterbatasan aksesibilitas di beberapa distrik menyebabkan proses penyaluran bantuan tidak berjalan secara seragam, baik dari segi waktu maupun mekanisme distribusi.

Interaksi antaraktor dalam implementasi kebijakan juga menunjukkan dinamika yang kompleks. Aparat lokal memiliki peran penting dalam menjembatani kebijakan dengan masyarakat, namun kewenangan yang terbatas serta tekanan sosial di tingkat komunitas sering memengaruhi proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, masyarakat penerima bantuan umumnya memahami bantuan sosial sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi memiliki pemahaman yang terbatas terhadap prosedur dan kriteria kebijakan. Kondisi ini berkontribusi pada munculnya praktik-praktik informal dalam penyaluran bantuan, yang pada satu sisi membantu menjangkau masyarakat, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dan kesenjangan dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Merauke.

**Tabel 1. Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Merauke**

Aspek Implementasi	Temuan Empiris Utama	Sumber Data
Kerangka Implementasi	Penyaluran bantuan sosial secara formal mengacu pada kebijakan dan pedoman teknis nasional, dengan pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal.	Dokumen kebijakan, wawancara aparat daerah
Mekanisme Pendataan	Pendataan penerima bantuan masih bergantung pada data lama dan belum diperbarui secara berkala, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat terkini.	Wawancara pelaksana, studi dokumentasi
Proses Verifikasi	Verifikasi data dilakukan oleh aparat kampung/kelurahan, namun sering terkendala keterbatasan waktu, kapasitas aparatur, dan tekanan sosial dari komunitas setempat.	Wawancara aparat kampung
Distribusi Bantuan	Penyaluran bantuan tidak berlangsung secara seragam antarwilayah, terutama di distrik terpencil yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.	Observasi lapangan, wawancara masyarakat
Peran Aktor Lokal	Aparat lokal menjadi aktor kunci dalam menjembatani kebijakan dengan masyarakat, meskipun kewenangan yang terbatas memengaruhi efektivitas implementasi.	Wawancara informan kunci
Pemahaman Masyarakat	Sebagian masyarakat memahami bantuan sosial sebagai bantuan kebutuhan jangka pendek, namun kurang memahami kriteria dan mekanisme kebijakan secara formal.	Wawancara penerima dan non-penerima
Praktik Informal	Muncul praktik informal dalam penyaluran bantuan sebagai respons terhadap keterbatasan sistem formal, yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan implementasi.	Observasi, wawancara lintas aktor

Tabel 1 berdasarkan sajian data pada Tabel tersebut, implementasi penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Merauke secara umum telah mengikuti kerangka kebijakan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaksana utama di tingkat lokal. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa mekanisme pendataan dan verifikasi penerima bantuan masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait dengan akurasi dan pembaruan data yang belum dilakukan secara optimal. Ketergantungan pada data lama serta keterbatasan kapasitas aparatur di tingkat kampung dan kelurahan berdampak pada ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Selain itu, proses distribusi bantuan belum berjalan secara merata antarwilayah, khususnya di distrik terpencil

yang memiliki keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur. Peran aktor lokal menjadi sangat krusial dalam menjembatani kebijakan dengan masyarakat, meskipun kewenangan yang terbatas dan tekanan sosial di tingkat komunitas memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini turut mendorong munculnya praktik-praktik informal dalam penyaluran bantuan sosial yang pada satu sisi berfungsi sebagai mekanisme adaptif terhadap keterbatasan sistem formal, tetapi di sisi lain berpotensi memperlebar kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi di lapangan.

**Tabel 2. Bentuk-Bentuk Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik Penyaluran Bantuan Sosial**

Dimensi Kebijakan	Ketentuan Kebijakan (Normatif)	Praktik di Lapangan (Empiris)	Bentuk Kesenjangan
Penentuan Sasaran	Bantuan sosial ditujukan kepada rumah tangga miskin dan rentan berdasarkan kriteria nasional yang baku.	Penerima bantuan mencakup rumah tangga yang tidak memenuhi kriteria, sementara sebagian kelompok rentan tidak terdata.	Ketidaktepatan sasaran (inclusion dan exclusion error).
Pendataan Penerima	Data penerima diperbarui secara berkala dan terintegrasi antara pusat dan daerah.	Pendataan masih mengandalkan data lama dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial-ekonomi terkini.	Kesenjangan akurasi dan validitas data.
Mekanisme Distribusi	Penyaluran bantuan dilakukan secara tepat waktu dan merata di seluruh wilayah.	Distribusi bantuan sering mengalami keterlambatan dan tidak seragam, terutama di wilayah terpencil.	Ketimpangan waktu dan akses distribusi.
Peran Aktor Lokal	Aparat lokal berfungsi sebagai fasilitator teknis sesuai dengan pedoman kebijakan.	Aparat lokal memiliki peran dominan dalam menentukan penerima akibat keterbatasan sistem formal.	Diskresi informal yang melampaui kewenangan formal.
Transparansi dan Akuntabilitas	Proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan dapat diawasi publik.	Informasi terkait kriteria dan mekanisme bantuan tidak sepenuhnya dipahami masyarakat.	Kesenjangan transparansi dan pemahaman publik.
Partisipasi Masyarakat	Masyarakat dilibatkan dalam proses pendataan dan pengawasan.	Partisipasi masyarakat bersifat terbatas dan lebih bersifat reaktif.	Partisipasi semu dan tidak substansial.

Tabel 2 berdasarkan sajian data pada tabel tersebut, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan kebijakan penyaluran bantuan sosial yang bersifat normatif dan praktik implementasinya di tingkat lokal. Secara normatif, kebijakan menetapkan kriteria sasaran yang jelas, mekanisme pendataan yang terintegrasi dan mutakhir, serta prinsip distribusi yang tepat waktu, merata, transparan, dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya, penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Merauke masih ditandai oleh ketidaktepatan sasaran penerima, baik dalam bentuk *inclusion error* maupun *exclusion error*, yang dipicu oleh keterbatasan akurasi dan pembaruan data. Selain itu, proses distribusi bantuan belum berjalan secara seragam antarwilayah, terutama di daerah terpencil, sehingga menimbulkan ketimpangan akses dan keterlambatan penyaluran. Peran aparat lokal yang seharusnya bersifat fasilitatif dalam kerangka kebijakan formal juga cenderung berkembang menjadi diskresi informal akibat tekanan sosial dan keterbatasan sistem administrasi, yang pada akhirnya memengaruhi transparansi dan akuntabilitas implementasi kebijakan. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap kriteria dan mekanisme bantuan serta rendahnya partisipasi substantif dalam proses pendataan dan pengawasan semakin memperkuat kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik penyaluran bantuan sosial di tingkat lokal.

**Tabel 3. Permasalahan Pendataan dan Validitas Data Penerima Bantuan Sosial**

Aspek Pendataan	Kondisi Normatif	Temuan Empiris di Lapangan	Implikasi terhadap Penyaluran Bantuan
Pemutakhiran Data	Data penerima diperbarui secara berkala sesuai perubahan kondisi sosial-ekonomi.	Pemutakhiran data tidak dilakukan secara rutin dan masih mengandalkan data lama.	Data tidak mencerminkan kondisi aktual masyarakat.
Integrasi Data	Data penerima terintegrasi antara pusat dan daerah.	Terdapat ketidaksinkronan antara data nasional dan data lokal.	Terjadi duplikasi atau penghilangan calon penerima.
Metode Pendataan	Pendataan dilakukan secara partisipatif dan berbasis verifikasi lapangan.	Pendataan bersifat administratif dan minim verifikasi faktual.	Tingginya potensi kesalahan sasaran.
Kapasitas Aparatur	Aparatur memiliki kemampuan teknis memadai dalam pendataan.	Keterbatasan kapasitas dan beban kerja aparat lokal.	Penurunan kualitas proses pendataan.
Kondisi Geografis	Wilayah mudah dijangkau untuk pendataan menyeluruh.	Wilayah luas dan akses sulit, terutama di distrik terpencil.	Kelompok rentan sulit terdata secara optimal.
Legitimasi Data	Data penerima diakui dan dipercaya masyarakat.	Muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap data penerima.	Potensi konflik sosial dan penolakan kebijakan.

Tabel 3 berdasarkan sajian data pada tabel tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan pendataan dan validitas data penerima bantuan sosial menjadi salah satu sumber utama terjadinya kesenjangan implementasi kebijakan di Kabupaten Merauke. Secara normatif, sistem pendataan dirancang untuk bersifat mutakhir, terintegrasi, dan partisipatif, namun dalam praktiknya pemutakhiran data belum dilakukan secara rutin dan masih sangat bergantung pada data administratif lama yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat terkini. Ketidaksinkronan antara data nasional dan data lokal semakin memperbesar potensi kesalahan sasaran, baik dalam

bentuk duplikasi penerima maupun eksklusif kelompok rentan yang seharusnya memperoleh bantuan. Keterbatasan kapasitas aparatur di tingkat lokal, beban kerja yang tinggi, serta tantangan geografis berupa luas wilayah dan sulitnya akses ke daerah terpencil turut menurunkan kualitas proses pendataan dan verifikasi lapangan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya legitimasi data penerima di mata masyarakat, yang kemudian memicu ketidakpercayaan, potensi konflik sosial, serta melemahkan efektivitas dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di tingkat lokal.

**Tabel 4. Faktor Penyebab Kesenjangan Implementasi dan Dampaknya terhadap Kelompok Rentan**

Kategori Faktor	Temuan Empiris Utama	Bentuk Kesenjangan Implementasi	Dampak terhadap Kelompok Rentan
Faktor Struktural	Desain kebijakan bersifat seragam dan kurang adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial lokal.	Ketidaksesuaian antara ketentuan kebijakan dan realitas lapangan.	Kelompok rentan di wilayah terpencil tidak terjangkau bantuan secara optimal.
Faktor Institusional	Keterbatasan kapasitas aparatur dan lemahnya koordinasi lintas sektor.	Proses pendataan dan distribusi berjalan tidak konsisten.	Penerima bantuan mengalami keterlambatan dan ketidakpastian akses.
Faktor Administratif	Sistem pendataan tidak mutakhir dan kurang terintegrasi.	Tingginya kesalahan sasaran penerima.	Muncul eksklusif kelompok miskin yang layak menerima bantuan.
Faktor Sosial-Budaya	Tekanan sosial lokal dan relasi kekuasaan di tingkat komunitas.	Diskresi informal aparat dalam penentuan penerima.	Distribusi bantuan tidak adil dan berpotensi memicu konflik sosial.
Faktor Geografis	Luas wilayah dan keterbatasan infrastruktur transportasi.	Ketimpangan distribusi antarwilayah.	Kerentanan sosial-ekonomi masyarakat terpencil semakin meningkat.
Faktor Informasional	Minimnya transparansi dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan.	Partisipasi masyarakat bersifat pasif dan reaktif.	Ketergantungan pada bantuan tanpa pemahaman hak dan mekanisme kebijakan.

Tabel 4 berdasarkan sajian data pada tabel tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Merauke dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, institusional, administratif, sosial-budaya, geografis, dan informasional yang saling berinteraksi. Desain kebijakan yang bersifat seragam dan kurang adaptif terhadap kondisi lokal, ditambah dengan keterbatasan kapasitas aparatur serta lemahnya koordinasi lintas sektor, menyebabkan proses pendataan dan distribusi bantuan berjalan tidak konsisten. Permasalahan administratif berupa sistem data yang tidak mutakhir memperbesar kesalahan sasaran, sementara tekanan sosial dan relasi kekuasaan di tingkat komunitas mendorong munculnya diskresi informal dalam penentuan penerima bantuan. Faktor geografis berupa luas wilayah dan keterbatasan infrastruktur semakin memperlebar ketimpangan distribusi antarwilayah, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil. Akumulasi berbagai faktor tersebut berdampak langsung pada kelompok rentan, yang tidak hanya mengalami keterlambatan dan ketidakpastian akses terhadap bantuan sosial, tetapi juga menghadapi risiko eksklusif, meningkatnya kerentanan sosial-ekonomi, serta potensi konflik sosial yang melemahkan tujuan kebijakan perlindungan sosial untuk menciptakan keadilan dan inklusi.

**Tabel 5. Paradoks Perlindungan Sosial di Tingkat Lokal dan Implikasi Kebijakan**

Dimensi Analisis	Temuan Empiris Utama	Bentuk Paradoks Perlindungan Sosial	Implikasi Kebijakan dan Pembelajaran Implementasi
Tujuan Kebijakan	Kebijakan bantuan sosial dirancang untuk inklusi dan keadilan sosial.	Kebijakan inklusif secara normatif menghasilkan eksklusif dalam praktik.	Perlunya penyesuaian desain kebijakan yang lebih kontekstual.
Desain vs Implementasi	Ketentuan kebijakan bersifat seragam dan terstandar secara nasional.	Standarisasi kebijakan tidak sejalan dengan keragaman kondisi lokal.	Fleksibilitas kebijakan berbasis karakteristik wilayah.
Peran Aktor Lokal	Aparat lokal menjadi aktor kunci implementasi di lapangan.	Diskresi informal muncul akibat keterbatasan sistem formal.	Penguatan kapasitas dan kejelasan kewenangan aparat lokal.
Sistem Pendataan	Pendataan berbasis data terpadu dan administratif.	Data formal tidak mencerminkan realitas sosial aktual.	Integrasi data berbasis verifikasi lapangan dan partisipasi masyarakat.
Akses dan Distribusi	Penyaluran bantuan diharapkan merata dan tepat waktu.	Ketimpangan akses antarwilayah dan kelompok rentan.	Strategi distribusi adaptif untuk wilayah terpencil.
Relasi Negara–Masyarakat	Bantuan sosial dimaksudkan memperkuat kepercayaan publik.	Ketidaktepatan sasaran memicu ketidakpercayaan dan konflik sosial.	Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi kebijakan.

Tabel 5 berdasarkan sajian data pada tabel tersebut, penelitian ini mengungkap adanya paradoks perlindungan sosial di tingkat lokal, di mana kebijakan bantuan sosial yang secara normatif dirancang untuk mewujudkan inklusi dan keadilan sosial justru menghasilkan eksklusif dan ketimpangan dalam praktik implementasinya. Standarisasi desain kebijakan di tingkat nasional tidak sepenuhnya selaras dengan keragaman kondisi sosial, geografis, dan institusional di Kabupaten Merauke, sehingga memunculkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas pelaksanaannya. Dalam konteks ini, aparat lokal memainkan peran kunci sebagai pelaksana kebijakan, namun keterbatasan sistem formal dan

kapasitas institusional mendorong munculnya diskresi informal yang memengaruhi akurasi sasaran dan konsistensi distribusi bantuan. Permasalahan pendataan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial aktual serta ketimpangan akses antarwilayah semakin memperkuat paradoks tersebut dan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial. Temuan ini memberikan pembelajaran penting bagi perumusan kebijakan, khususnya perlunya desain kebijakan yang lebih kontekstual dan fleksibel, penguatan kapasitas dan kewenangan aktor lokal, integrasi sistem pendataan berbasis verifikasi lapangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas sebagai prasyarat untuk memperbaiki efektivitas implementasi perlindungan sosial di wilayah perifer.

## 1.2. Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya paradoks perlindungan sosial yang tercermin dari ketegangan antara tujuan normatif kebijakan bantuan sosial dan realitas implementasinya di tingkat lokal. Secara konseptual, kebijakan perlindungan sosial dirancang untuk menjamin inklusivitas, keadilan, dan perlindungan bagi kelompok miskin dan rentan, namun dalam praktik penyaluran di Kabupaten Merauke justru ditemukan berbagai bentuk eksklusif, ketidaktepatan sasaran, dan ketimpangan akses bantuan. Paradoks ini muncul sebagai konsekuensi dari interaksi antara desain kebijakan yang bersifat seragam dan kompleksitas konteks lokal yang ditandai oleh keterbatasan infrastruktur, keragaman sosial-budaya, serta kapasitas kelembagaan yang tidak merata. Dalam kerangka paradoks perlindungan sosial, temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan tidak semata ditentukan oleh kejelasan tujuan dan instrumen kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan sistem implementasi untuk merespons dinamika lokal. Dengan demikian, kebijakan perlindungan sosial yang secara normatif progresif berpotensi menghasilkan hasil yang kontraproduktif apabila tidak disertai dengan mekanisme implementasi yang adaptif dan kontekstual, sehingga mempertegas pentingnya pendekatan kebijakan yang lebih sensitif terhadap realitas sosial di wilayah perifer.

Kesenjangan antara kebijakan dan praktik penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Merauke dapat dipahami secara lebih komprehensif melalui perspektif teori kebijakan publik, khususnya teori implementasi kebijakan[13]. Dalam pendekatan top-down, kebijakan dipandang sebagai seperangkat tujuan dan instrumen yang dirumuskan oleh otoritas pusat untuk kemudian diimplementasikan secara konsisten di tingkat bawah. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa desain kebijakan bantuan sosial yang bersifat seragam dan berorientasi nasional sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan kondisi sosial, geografis, dan institusional di tingkat lokal. Ketidaksesuaian ini menciptakan ruang kesenjangan implementasi, di mana tujuan kebijakan yang bersifat normatif sulit diwujudkan secara optimal dalam praktik lapangan. Pendekatan bottom-up menekankan peran aktor lokal dan konteks implementasi sebagai faktor kunci dalam menentukan hasil kebijakan. Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, aktor pelaksana di tingkat daerah dan lapangan, termasuk aparat kampung dan pendamping program, memiliki peran strategis dalam menafsirkan dan menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan konkret. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas, sumber daya, dan pemahaman kebijakan di tingkat lokal memengaruhi cara kebijakan dijalankan, sehingga memunculkan variasi implementasi antarwilayah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hasil kebijakan tidak hanya merupakan refleksi dari desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga dari dinamika interaksi antaraktor di tingkat implementasi.

Konsep street-level bureaucracy memberikan kerangka analitis yang relevan untuk menjelaskan kesenjangan implementasi kebijakan bantuan sosial[14]. Aparat pelaksana di garis depan memiliki tingkat diskresi yang tinggi dalam menentukan siapa yang dianggap layak menerima bantuan, bagaimana prosedur dijalankan, dan bagaimana kebijakan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Diskresi ini, meskipun sering kali dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan kebijakan formal, dalam praktiknya dapat menghasilkan ketidakkonsistenan dan potensi bias dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam konteks Kabupaten Merauke, diskresi pelaksana sering dipengaruhi oleh tekanan sosial, relasi kekuasaan lokal, dan keterbatasan informasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada munculnya ketidaktepatan sasaran dan ketimpangan akses. Dengan demikian, kesenjangan implementasi kebijakan bantuan sosial tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan teknis, melainkan sebagai fenomena struktural yang berakar pada interaksi antara desain kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan konteks sosial lokal. Perspektif teori kebijakan publik menegaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kemampuan sistem implementasi untuk menjembatani kepentingan dan logika kebijakan pusat dengan realitas di tingkat lapangan. Oleh karena itu, pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan implementasi yang lebih adaptif, partisipatif, dan kontekstual untuk mengurangi kesenjangan antara kebijakan dan praktik dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya di wilayah perifer.

Masalah data merupakan salah satu isu sentral dalam tata kelola penyaluran bantuan sosial dan menjadi faktor utama yang memengaruhi munculnya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di tingkat lokal[15]. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akurasi dan keterbaruan data penerima bantuan sosial masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah perifer seperti Kabupaten Merauke. Ketergantungan pada basis data terpusat yang tidak selalu mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat lokal menyebabkan terjadinya ketidaktepatan sasaran, baik dalam bentuk eksklusif kelompok rentan yang seharusnya menerima bantuan maupun inklusi kelompok yang tidak lagi memenuhi kriteria. Kondisi ini memperlihatkan bahwa data tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai fondasi legitimasi kebijakan perlindungan sosial. Selain persoalan akurasi, temuan penelitian juga mengungkap adanya ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang berdampak pada lemahnya koordinasi dan efektivitas implementasi kebijakan. Proses pemutakhiran data yang bersifat periodik dan birokratis sering kali tidak mampu merespons perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara cepat, khususnya di daerah dengan mobilitas penduduk tinggi dan keterbatasan infrastruktur. Ketidakharmonisan sistem data ini tidak hanya menghambat

proses penyaluran bantuan sosial, tetapi juga memperkuat fragmentasi tata kelola antarlevel pemerintahan, sehingga tujuan kebijakan yang bersifat inklusif sulit dicapai secara optimal.

Dari perspektif tata kelola, masalah data juga berkaitan erat dengan kapasitas kelembagaan dan mekanisme pengawasan. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan teknis, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi menyebabkan proses pendataan dan verifikasi sering kali dilakukan secara administratif tanpa pendalaman kontekstual. Dalam praktiknya, kondisi ini membuka ruang bagi penggunaan diskresi yang berlebihan dan praktik informal dalam menentukan penerima bantuan, yang berpotensi menimbulkan bias dan ketidakadilan. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan data tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola kebijakan dan akuntabilitas institusional. Lebih jauh, masalah data dan tata kelola dalam penyaluran bantuan sosial memiliki implikasi sosial yang signifikan, terutama terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidaktepatan sasaran dan ketidakonsistenan penyaluran bantuan berpotensi memunculkan persepsi ketidakadilan dan ketidaktransparanan, yang pada gilirannya dapat melemahkan legitimasi kebijakan perlindungan sosial[16]. Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem data yang adaptif, partisipatif, dan terintegrasi sebagai bagian dari reformasi tata kelola bantuan sosial, guna memastikan bahwa kebijakan perlindungan sosial dapat berfungsi secara efektif dan berkeadilan, khususnya di wilayah perifer.

Konteks lokal Kabupaten Merauke dan dinamika sosial-budaya masyarakatnya memainkan peran penting dalam membentuk praktik implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial. Karakteristik wilayah yang luas, keterbatasan infrastruktur, serta sebaran permukiman yang tidak merata memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan publik, termasuk bantuan sosial. Di sisi lain, keberagaman sosial-budaya, khususnya keberadaan masyarakat adat dengan sistem nilai, struktur sosial, dan mekanisme solidaritas yang khas, memengaruhi cara kebijakan dipahami dan direspons di tingkat lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial yang dirancang secara seragam sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan pola kehidupan dan relasi sosial masyarakat setempat, sehingga memunculkan praktik informal dan penyesuaian lokal dalam penyaluran bantuan. Kondisi ini menegaskan bahwa konteks sosial-budaya bukan sekadar latar belakang kebijakan, melainkan faktor aktif yang memediasi interaksi antara kebijakan dan masyarakat.

Kesenjangan implementasi yang muncul dari ketidaksensitifan kebijakan terhadap konteks lokal tersebut memiliki implikasi sosial dan kelembagaan yang signifikan. Secara sosial, ketidaktepatan sasaran dan ketimpangan akses bantuan berpotensi memperdalam kerentanan kelompok tertentu serta memicu ketegangan sosial di tingkat komunitas, terutama ketika bantuan sosial dipersepsikan tidak adil atau tidak transparan. Secara kelembagaan, kesenjangan implementasi ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dan institusi pelaksana kebijakan, sekaligus membatasi efektivitas program perlindungan sosial dalam jangka panjang. Lebih jauh, ketidakharmonisan antara kebijakan formal dan praktik lokal dapat mereproduksi pola ketergantungan dan eksklusif struktural, sehingga menghambat tujuan kebijakan untuk menciptakan keadilan sosial dan inklusi. Dengan demikian, temuan ini menekankan pentingnya pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial-budaya lokal, serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasinya.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur perlindungan sosial dengan memperkaya pemahaman mengenai paradoks implementasi kebijakan di wilayah perifer dan beragam secara sosial-budaya. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan sosial tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan dan ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan sistem implementasi untuk merespons konteks lokal, dinamika aktor, dan praktik informal yang berkembang di tingkat lapangan. Dengan menempatkan Kabupaten Merauke sebagai *locus analisis*, penelitian ini mengisi kesenjangan empiris dalam kajian perlindungan sosial yang selama ini lebih berfokus pada wilayah perkotaan atau konteks nasional agregat. Dari sisi kebijakan, temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan implementasi yang lebih adaptif dan kontekstual, termasuk penguatan sistem pendataan yang partisipatif dan berkelanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan pelaksana di tingkat lokal, serta mekanisme koordinasi dan pengawasan yang lebih efektif. Arah perbaikan implementasi kebijakan perlindungan sosial juga perlu diarahkan pada peningkatan keterlibatan masyarakat dan pengakuan terhadap dinamika sosial-budaya lokal, sehingga kebijakan tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan substantif perlindungan sosial yang berkeadilan dan inklusif.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Merauke menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara desain kebijakan dan praktik implementasinya, yang merefleksikan paradoks perlindungan sosial di tingkat lokal. Meskipun kebijakan bantuan sosial secara normatif dirancang untuk menjamin inklusivitas dan keadilan bagi kelompok miskin dan rentan, realitas di lapangan masih diwarnai oleh ketidaktepatan sasaran, keterbatasan akurasi data, serta ketimpangan akses antarwilayah dan kelompok sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa kompleksitas konteks geografis, sosial, dan budaya wilayah perifer, yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam desain kebijakan nasional, berkontribusi terhadap lemahnya efektivitas implementasi. Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antaraktor memperkuat kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan perlindungan sosial yang lebih adaptif, kontekstual, dan partisipatif agar tujuan keadilan sosial dapat diwujudkan secara

substansif, khususnya di wilayah periferan seperti Kabupaten Merauke.

## 5. Daftar Pustaka

- [1] A. Sarjito, "Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan," *J. Ilmu Sos. Polit. Dan Hum.*, vol. 6, no. 2, pp. 1–12, 2023.
- [2] D. Dassucik and I. Farida, "PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN: STRATEGI MENUJU NEGARA BERKEMBANG," *Penerbit Tahta Media*, 2025.
- [3] R. A. Huda, R. A. Puspita, S. N. Hasanah, and A. Malik, "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang," *Kalianda Halok Gagas*, vol. 7, no. 2, pp. 189–201, 2024.
- [4] S. B. Prasetyo, A. Sofianto, L. Febrian, O. C. Ambarwati, W. Widodo, and L. K. Nuriyanto, "Rekonstruksi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah: Bukan Sekedar Bantuan Sosial," *Anal. Kebijak. Drh.*, vol. 1, no. 1, pp. 9–12, 2023.
- [5] G. Widjaja and H. Dhanudibroto, "KOORDINASI ANTAR-LEMBAGA PEMERINTAH DAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN," *SIBATIK J. J. Ilm. Bid. Sos. Ekon. Budaya, Teknol. Dan Pendidik.*, vol. 4, no. 7, pp. 1323–1332, 2025.
- [6] I. A. P. S. Widnyani, *Transformasi Perencanaan Pembangunan melalui Mekanisme Musyawarah Desa*. Deepublish, 2025.
- [7] N. MANGUNSONG, "PENATAAN REGULASI PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENUJU TATA KELOLA YANG EFEKTIF," 2025, *Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII*.
- [8] D. Katayu, "DINAMIKA REFORMASI BIROKRASI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MERAUKE," *J. Intelek Insa. Cendikia*, vol. 1, no. 10, pp. 8247–8258, 2024.
- [9] M. Jeddawi, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH (DOKA) DI KABUPATEN ACEH BARAT," 2025, *INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI*.
- [10] M. Marwa, "INKLUSIVITAS KEBIJAKAN DAN PERAN AKTOR DALAM PENGELOLAAN PUPUK SUBSIDI DI DESA BATU ALANG KEC. SABBANG SELATAN KAB. LUWU UTARA," 2025, *Universitas Islam Negri Palopo*.
- [11] I. Siregar, S. Khairunnisa, A. Nurfadilah, and A. Mawahda, "Analisis Data Penelitian Tindakan Kelas dalam Upaya Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas 4 di SDIT Babussalam Sagulung," *QOUBA J. Pendidik.*, vol. 1, no. 2, pp. 104–112.
- [12] A. B. A. Wahid, "PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS".
- [13] M. A. Sesa and B. Thahir, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM RANGKA MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN ORANG ASLI PAPUA DI KABUPATEN JAYAPURA," 2025, *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- [14] A. Puspaningtyas, Y. Hariyoko, and D. Widodo, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN 'UNIVERSAL HEALTH COVERAGE' MENGGUNAKAN PENDEKATAN STREET LEVEL BUREAUCRACY DI KABUPATEN GRESIK," *PRAJA Obs. J. Penelit. Adm. Publik (e-ISSN 2797-0469)*, vol. 5, no. 02, pp. 12–20, 2025.
- [15] J. Noya, "INTEGRASI KEBIJAKAN SOSIAL DAN TATA KELOLA ADMINISTRASI PUBLIK: STUDI KASUS PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA," *J. BADATI*, vol. 7, no. 1, pp. 167–192, 2025.
- [16] S. H. Mega Nugraha, A. Tiansah, S. Sunarto, and M. P. Alamsyah, *Dampak Sosial Program Keluarga Harapan pada Keluarga Pra-Sejahtera*. Penerbit Adab.